

MENGEMBANGKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MODERNISASI, DEMOKRATISASI DAN GLOBALISASI¹

(DEVELOPING INSAN CENDEKIA HIGH SCHOOL TO ADDRESS MODERNISATION, DEMOCRACY, AND GLOBALISATION CHALLENGES)

Makmuri Sukarno

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
Korespondensi Penulis: *murikarno@yahoo.com*

Abstract

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC) faces, similar with other schools, disfunctional in preparing people that are more qualified, if the institution does not reform it-self along with the strategic challanges which are developing. MAN-IC, that was build based on Modernist-Islam spirit, is a model madrasah especially with regard to its religious and science & technology teaching practices. Nowadays, this institution is not only challanged with old challanges, that are searching Islamic as well as Indonesian characters and modernization, but also with the new ones, that are democratization including local otonomy and globalization. Rapid Assessment method to see its governance, management, curriculum, and teaching-learning aspects within the two of three existing MAN-ICs (which are located in Jakarta and Jambi) reveals the imbalances and un-readiness of those institution in facing those challanges. Reform on those aspects proposed by this article is assumed to be empowering its responsive ability in preparing future generation.

Keywords: *Education, Madrasah, Governance, Management, Modernization, Democratisation, Globalization.*

PENDAHULUAN

Dalam Politik Etis kolonial Belanda, menurut Brugmans (1987) pendidikan lebih ditekankan aspek pengajarannya, yaitu untuk menyiapkan generasi

Abstrak

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN-IC), seperti halnya sekolah pada umumnya, terancam disfungsional dalam menyiapkan penduduk yang berkualitas, jika tidak memperbaharui diri sesuai dengan tantangan strategis yang berkembang. MAN-IC, yang didirikan dengan semangat Islam-Modernis, merupakan madrasah percontohan, terutama dalam pembelajaran agama dan sains/teknologi. Sekarang lembaga ini tidak hanya ditantang oleh tantangan lama, yaitu menemukan karakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dan tantangan modernisasi, melainkan juga tantangan baru, yaitu demokratisasi (termasuk otonomi daerah) dan globalisasi. Melalui metode *Rapid Assessment* terhadap sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC (yaitu di Jakarta dan Jambi), nampaklah ketidakseimbangan sekaligus ketidaksiapan lembaga ini dalam merespon tantangan-tantangan tersebut. Pembaharuan pada hal-hal tersebut di atas yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan responsif MAN-IC dalam menyiapkan generasi mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan, Madrasah, *Governance*, Manajemen, Modernisasi, Demokratisasi, Globalisasi

dengan *knowledge* dan terutama *knowhow* untuk mendukung politik dan ekonomi kolonial. Pasca Perang Dunia kedua, negara-negara berkembang sebagai negara bangsa yang baru lahir, cenderung menekankan pertama-tama peran pendidikan sebagai alat pembentukan kebangsaan (*nation and character*

¹ Tulisan ini dikembangkan dari paper hasil penelitian yang dipresentasikan pada Diskusi Pengembangan Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Senin 28 Januari 2013, di Jakarta.

building), dan kemudian sebagai alat modernisasi khususnya industrialisasi, yaitu dengan mengembangkan *knowledge* dan *knowhow* penduduk untuk mengejar ketertinggalan, terutama ekonominya. Dengan demikian, pembangunan sistem pendidikan nasional yang baru tersebut relatif memarjinalisasi sistem pendidikan yang disebut oleh Furnivall (1943:7) sebagai “pendidikan asli” yang dianut oleh komunitas-komunitas. Oleh karena itu, negara berperan sentral menempatkan pendidikan nasional sebagai alat transformasi budaya, sosial dan ekonomi. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam sistem pendidikan nasional boleh dikatakan hanya berperan resisten, komplemen atau adaptif terhadap peran sentral yang dimainkan oleh negara. Dampaknya adalah teralienasinya kelompok terdidik dari budaya lokalnya, serta meningkatnya kompetisi antar individu dan antar kelompok masyarakat dalam memperebutkan jabatan pekerjaan modern yang bersifat impersonal yang tumbuh dari negara yang baru. Muncul kesenjangan karena pengangguran terselubung kelompok kurang berpendidikan formal serta melemah hubungan setara dan kekerabatan. Reaksi terhadap peran negara yang berlebihan dan memarjinalisasi peran pendidikan komunitas menggejala dalam bentuk politik identitas yang akarnya tumbuh dari kerinduan pada keakraban dan perlindungan (oleh patron) yang pernah dialami di masyarakat primordial (Fukuyama, 2009: 12). Dalam bentuk yang ekstrem, reaksi itu berujung penyelenggaraan pendidikan yang eksklusif yang kadang-kadang disertai politik separatisme pendidikan.

Munculnya madrasah negeri (standard Depag) antara lain adalah untuk mengurangi reaksi ekstrem tersebut dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan umum yang diselenggarakan negara dan “pendidikan asli” termasuk pesantren yang diselenggarakan masyarakat, serta memperkecil kesenjangan sosial ekonomi dengan kelompok berpendidikan umum. Namun demikian, upaya tersebut nampak berjalan lambat, antara lain oleh karena kuatnya peran pendidikan “asli”/lokal ini sebagai instrumen reproduksi sosial dan politik lokal dan karena masih lemahnya pengaruh pemikiran Islam modernis di tanah air. Di samping itu juga karena dukungan pemerintah sendiri lemah, bahkan sampai sekarang diskriminatif terhadap madrasah formal yang diperkenalkannya (USAID dan DBE3, 2007:19).

² Madrasah secara formal secara bertahap bergeser dari pengutamaan pendidikan agama ke pendidikan umum (yaitu mencapai 70 persen; Keputusan Bersama Tiga menteri tahun 1975), tetapi MAN-IC sejak awal didirikannya sudah memprioritaskan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).

³ Sistem MAN-IC dengan model asrama (*boarding*) ini telah menunjukkan keberhasilan akademik yang menonjol. Mulai dari tingkat kelulusan yang mendekati seratus persen, jumlah kelulusan

Sebagian madrasah masih tetap terpaku dan menjadi pelayan masyarakat tradisional dan yang lain lebih mendekati atau terkooptasi oleh negara, tetapi keduanya kurang tanggap terhadap tuntutan perubahan modernisasi yang datang². Oleh karena itu, munculnya penekanan pembelajaran sains dan teknologi (baca:modernisasi) di MAN-IC di tahun 90an sebagai madrasah model untuk menyambut tantangan modernisasi sekaligus mempertahankan nilai tradisi pondok pesantren (*Islamic boarding school*), merupakan fenomena penting. MAN-IC sebagai madrasah yang mengembangkan sekaligus menyeimbangkan *imtak* (iman-takwa) dan iptek ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Islam-Modernis (oleh ICMI di masa Prof Habibi)--, dijadikan oleh Departemen Agama sebagai model pengembangan bagi madrasah-madrasah yang lain ³. Kebijakan ini merupakan fenomena kebijakan pengembangan kualitas SDM yang penting. Hal ini karena model ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh madrasah dalam “memodernisasi” siswanya yang secara keseluruhan hampir seperlima dari seluruh siswa di lembaga pendidikan menengah ke bawah dan dalam dekade terakhir, jumlah lembaga dan siswanya tumbuh lebih cepat daripada sekolah serta umumnya melayani masyarakat menengah bawah (USAID dan DBE3, 2007:5). Di samping itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi ketertinggalan sains dan teknologi yang penting guna memanfaatkan peluang demografi yang sedang dialami Indonesia sampai tahun 2030-an.

Di tengah upaya MAN-IC menjawab tantangan modernisasi tersebut, muncul tantangan yang baru yang lahir di Era Reformasi, yaitu politik demokratisasi yang menuntut ruang bagi partisipasi dan pluralisme-kebhinnekaan (baca peran komunitas) dan otonomi daerah, serta globalisasi. Di tengah tantangan tersebut, pada berbagai madrasah muncul reaksi berupa eksklusifisme yang memarjinalkan ke-bhinneka-an, keengganan untuk menerima demokratisasi dan terjadinya marjinalisasi basis sosial madrasah yang umumnya berasal dari kelompok menengah bawah sebagai dampak globalisasi dan komersialisasi pendidikan (Amirrachman dkk, 2009: 143-151) di samping melemahnya secara umum pendidikan “karakter” pada pendidikan nasional⁴. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan nasional termasuk MAN-

yang banyak diterima di perguruan tinggi favorit (ITB, UGM, UI, IPB, UNAIR) sampai menerima beasiswa dari berbagai universitas ternama di luar negeri. Sejak tahun 2009, agaknya karena potensinya yang besar, ujian rekrutmen calon penerima beasiswa dari Indonesia dilakukan Nanyang Technology University di madrasah ini.

⁴ Nampak pada ungkapan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Nawacita presiden /wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

IC sebagai upaya menyiapkan sejak dini agar generasi penerus lebih tanggap dalam menjawab tantangan lama (modernisasi) maupun tantangan yang baru (demokratisasi dan globalisasi) yang sedang berlangsung memerlukan reorientasi dan penyegaran.

Reorientasi MAN-IC agar lebih tanggap terhadap perubahan atau akumulasi tantangan-tantangan tersebut tersebar dari hal yang menyangkut sistem penyelenggaraan (*governance*), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran. Di samping itu MAN-IC ini juga perlu dipersiapkan agar dapat direplikasi di daerah lain untuk mendorong munculnya keunggulan lokal yang khas. Atas dasar dua kepentingan di atas itulah maka metode *rapid assessment* telah dilakukan. *Rapid assesment* atas penyelenggaraan dan pelaksanaan MAN-IC telah dilakukan di dua lokasi (Jakarta dan Jambi) tahun 2012, merupakan studi kualitatif dan sebagai penelitian kebijakan (*policy research*). Tujuannya adalah memberikan bahan untuk mengembangkan model MAN-IC yang ideal. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian singkat yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

LANDASAN TEORETIK DAN PARADIGMA POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Teori Human Capital menyebutkan bahwa investasi sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh *harapan nilai balik budaya dan sosial-ekonomi seumur hidup* yang dibayangkan lebih tinggi daripada kesempatan yang hilang (Becker, 1975: 9; Woodhall, 1987: 1-2). Teori ini dapat menerangkan mengapa anak-anak dan anak muda, terutama lelaki dianggap lebih 'menguntungkan' untuk menerima investasi pada pendidikan, karena mereka cenderung akan memperoleh nilai balik investasi yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya (Becker, 1975:64-75). Oleh karena itu pendidikan/pelatihan generasi muda menjadi prioritas investasi, baik oleh masyarakat, negara, maupun dunia usaha/perusahaan. Pendidikan generasi muda sebagai investasi diharapkan mampu menciptakan kekuatan untuk melakukan reproduksi dan transformasi budaya, sosial dan ekonomi di masa depan. Sejalan dengan hal di atas, terdapat aliran-aliran yang menekankan arti dan peran pendidikan secara berbeda-beda. Aliran Reproduksi (Bourdieu dan Passeron, 1977:26) menekankan peran pendidikan sebagai instrumen untuk *mereproduksi* budaya, sosial dan ekonomi, aliran Modernisme (Inkeles and Smith, 1974) menekankan peran pendidikan formal sebagai instrumen *transformasi* agar masyarakat menjadi modern, sedangkan aliran Post-Modernisme (Aronowitz & Giroux, 1990) menekankan peran

pendidikan sebagai "*locus of struggle*" dan instrumen *negosiasi* serta *cara kompetitif* bagi peserta didik untuk menentukan ke mana arah budaya, sosial dan ekonomi masyarakat ke depan. Pada ketiga aliran besar tersebut, baik yang menekankan reproduksi, transformasi ataupun "struggle"/ negosiasi serta kompetisi budaya, sosial dan ekonomi. Peran yang diberikan kepada masyarakat, negara dan dunia usaha dalam pendidikannya bervariasi sesuai dengan filsafat yang dianut. Filsafat Sosialisme menekankan peran komunitas, Etatisme menekankan peran negara, dan Kapitalisme menekankan peran dunia usaha dalam pendidikan. Kecenderungan pada masing-masing filsafat tersebut juga berdampak pada penekanan masing-masing aliran menyangkut aspek-aspek pendidikan, yaitu apakah akan lebih menekankan pada pendidikan *value*, pada *knowledge* atukah pada pendidikan *knowhow* di sekolah.

Paradigma politik pendidikan nasional Indonesia, yang mendasarkan diri pada falsafah Pancasila, tampak dari nilai yang terkandung pada masing-masing silanya, maupun UU Sisdiknasnya, yang mana mempunyai karakternya sendiri yaitu tidak membabi buta mereproduksi, atau sebaliknya mentransformasi ataupun "*struggle* dan *negisoasi*" terhadap semua bentuk realitas budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat. Paradigma politik pendidikan nasional Indonesia melakukan ketiganya secara selektif. Ini berarti bahwa falsafah pendidikan nasional juga mereproduksi, mentransformasi sekaligus menegosiasi/ mengkompetisikan realitas budaya, sosial dan ekonomi, sejauh persepektif masing-masing silanya dapat tumbuh kembang pada peserta didik. Demikian pula paradigma yang dimiliki tidaklah hanya mengandalkan salah satu saja dari tiga pilar yang ada (negara, pasar dan komunitas), melainkan memberikan peran kepada ketiganya sekaligus dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bersinergi mengembangkan semua silanya. Demikian pula MAN-IC berkewajiban menganut paradigma ini.

KONDISI AKTUAL TANTANGAN MODERNISASI, GLOBALISASI DAN DEMOKRATISASI

Dilihat dari sejarah pendidikan di negara-negara bangsa yang tumbuh setelah Perang Dunia Kedua dan ketika globalisasi belum masuk dengan deras, seperti diutarakan Martin (1978), pendidikan nampak lebih ditekankan untuk menciptakan kebangsaan (*nation and character building*, persatuan nasional) di atas masyarakat yang berbeda-beda suku dan agamanya. Namun pada tahap kemudian, yaitu setelah persatuan nasional dianggap oleh elit telah relatif tercapai,

pendidikan lebih diarahkan menjadi instrumen modernisasi/ industrialisasi nasional (*national socio-economic development*). Pendidikan Islam di Indonesia yang asli yang mempunyai berbagai nama sesuai daerah masing-masing, (seperti pesantren di Jawa, *kerbung* di Lombok, *dayah* di Aceh) pada umumnya tidak memberikan “pelajaran umum”, seperti Sejarah Indonesia, kewarganegaraan, matematika dan sains, juga kemudian secara bertahap menerima pelajaran-pelajaran tersebut. Madrasah merupakan bentuk baru hasil modernisasi terhadap pendidikan Islam yang asli tersebut (Noor, Sikand dan van Bruinessen, 2007: 14). Akibat modernisasi, komposisi kurikulum yang diajarkan di madrasah pun mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, yaitu dari penekanan yang kuat pada pelajaran agama ke penekanan yang kuat pada mata pelajaran umum, termasuk matematika dan sains (Amirrachman dkk, 2009: 143-151). Kendati demikian, modernisasi pendidikan di Indonesia, jika dilihat dari hasil pembelajarannya, pada umumnya belum mengembirakan. Hasil pendidikan di Indonesia termasuk madrasah, menurut *The Learning Curve Report*, dengan kriteria kemampuan matematika, sains dan membaca tertinggal, hanya sejajar dengan Kolumbia, Brazil, Thailand dan Meksiko (Suyanto, 2013:7). Survey TIMSS 2011 juga menunjukkan ketertinggalan siswa Indonesia di tingkat dasar dan menengah di bidang sains - menempati tiga urutan terendah, jauh di bawah hampir semua negara Timur Tengah (Tabel 3.2 TIMSS 2011 Sains, Terry Mart, 2012:6). Gambaran ketertinggalan ini diperkirakan lebih serius dialami madrasah apalagi pesantren.

Di samping itu, modernisasi yang dilakukan juga telah meminta ongkos sosialnya. Dalam proses perkembangannya, modernisasi/ industrialisasi yang dilakukan ini kemudian melahirkan spesialisasi, sehingga masyarakat baru yaitu sebagai bangsa terbagi atau terstratifikasi dalam klas-klas sosial dan profesi. Ini menimbulkan kesenjangan pembangunan secara geografis akibat perbedaan tingkat modernisasi/ industrialisasi yang mendorong migrasi-urbanisasi. Dalam kondisi seperti itu, maka pengikat sosial yang lama yang diberikan masyarakat lama (primordial), khususnya pengikat solidaritas ke atas dan ke sampingnya hilang, atau berubah menjadi impersonal, dan solidaritas ke dalam yaitu ikatan keluarga, mengendur. Di balik dinamika sosial seperti itu, juga terjadi pergeseran nilai yang pada dasarnya menuju pada keahlian yang dihargai dengan uang/materi sebagai kriteria yang menstratifikasi masyarakat. Nilai dasarnya, yaitu uang yang menjadi representasi tingkat keahlian, kemudian dirasakan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga modernisasi/industrialisasi dipandang juga membawa dehumanisasi. Respon

terhadap dehumanisasi akibat modernisasi/ industrialisasi muncul dalam bentuk sosial politik yaitu demokrasi. Yaitu, nilai *vote* atau suara yang dianggap lebih merepresentasi “nilai atau kepentingan” setiap manusia yang dianggap sama daripada sekedar tingkat kepemilikan uang yang senjang.

Namun demikian konsensus yang menjadi ciri demokrasi dipandang mereduksi perbedaan, karena disensus identitas yang plural tidak dapat direpresentasikan, sehingga menimbulkan anomie (Kymlicka, 1995:30). Akibatnya, di dalam demokrasi model lama, apalagi yang bertumpu pada negara-bangsa yang menekankan persatuan dan kurang menghargai keberagaman, ruang bagi tampilnya identitas pribadi-pribadi yang bersifat disensus atau plural menjadi sempit. Dalam bahasa Fukuyama (2007), industrialisasi dalam negara bangsa telah mengubah ethos masyarakat yang disebut Ferdinand Tonnies sebagai *gemeinschaft* (*paguyuban*) menjadi *gessellschaft* (*patembayan* (bhs Jawa) atau kompetisi) yang disertai penekanan berlebihan pada aspek ke-ikatan dari kebangsaan, mengakibatkan alienasi dan anomie sosial-ekonomi dan hilangnya identitas asli, maka pada puncak krisisnya menjadikan masyarakat ingin menemukannya kembali identitas atau jati-dirinya melalui politik identitas (Jackson, 2011:3) antara lain suku atau agama. Masyarakat yang mengalami alienasi dan anomie akibat modernisasi/industrialisasi dan penekanan pada keikatan itu kemudian memandang agama sebagai potensi untuk humanisasi karena agama memberikan nilai spiritual dan menjanjikan masyarakat yang kompak, intim-personal, beridentitas dan berkarakter. Pertumbuhan madrasah yang lebih cepat daripada sekolah akhir-akhir ini di Indonesia (USAID & DBE3, 2007:7), agaknya berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Agaknya pendidikan madrasah dianggap dapat menjadi simpul yang berperan mengisi, menyatukan, dan membangun format hubungan sosial yang baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah luntur akibat modernisasi/industrialisasi. Namun demikian, *counter-culture* sebagai respons terhadap modernisasi dan industrialisasi ini akan bersifat problematik bagi Madrasah, mengingat sebagai pendidikan formal berciri ke-Islam-an, di samping mengemban visi keumatan yang global juga harus melaksanakan modernisasi /industrialisasi tetapi tetap membangun jangkar (*anchor*) kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, upaya perbaikan model MAN-IC sendiri mendapat momentum politik ketika Kemenag berupaya mencari kembali arah madrasah ini di tengah tawaran Pemerintah Daerah untuk bekerjasama “menerapkan standard nasional MAN-IC” sekaligus mengakomodasikan warna lokal di daerah. Model

idealnya adalah dengan menjawab tantangan jaman dari perspektif Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan dengan mempertimbangkan Standar Pendidikan Nasional (SPN) sebagai pijakan keikaan serta mengakomodasi budaya lokal yang plural. Perspektif “ke-Islaman dan KeIndonesiaan” muncul menjadi masalah yang signifikan, ketika wadahnya yaitu negara-bangsa, juga mengalami tantangan serius. Hancurnya negara-bangsa (Ohmae, 2002: hal vi) seperti yang terjadi di berbagai negara, disebabkan oleh bergesernya peran empat *moulding factors* pembentuk negara-bangsa, yaitu teritorial, kontrol atas kekerasan, dan struktur kekuasaan impersonal serta legitimasi, akibat kehadiran faktor moulding yang baru, yaitu globalisasi industri, investasi, globalisme individu dan informasi, serta *global governance*. Oleh karena itu, kehadiran globalisasi menuntut pembentukan “karakter negara kebangsaan yang baru”.

Menghadapi kelima globalisasi itu, kelompok-kelompok sosial, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda yang terdapat di suatu negara atau wilayah, terpapar secara tidak simetrik dalam mendapatkan peluang dan tantangan yang masuk untuk mengembangkan ruang hidupnya (*lebensraum*). Akibatnya terjadi kesenjangan dan kesetaraan yang baru muncul yang menuntut tata hubungan dan *equilibrium* yang baru. Ohmae berpendapat bahwa guna memperkuat negara dari ancaman globalisasi, maka negara perlu memperkuat otonomi di daerah-daerah, antara lain melalui pengembangan peran komunitas dan otonomi daerah. Sejalan dengan itu maka permintaan beberapa daerah terhadap kehadiran MAN-IC untuk men-substitusi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang memberatkan anggaran daerah, merupakan peluang untuk diakomodasikan ke dalam model MAN-IC “baru” ke depan.

Di sisi lain, dampak dari globalisme individu dan informasi pada umat Islam cenderung menawarkan aliran politik, baik liberal (baca: Barat), maupun sebaliknya, yaitu *global Islamist* dari luar yang mengedepankan identitas tegas dan radikal, ke tengah umat Islam Indonesia yang sedang mengalami kelunturan identitas (lokal) akibat penekanan ke-ika-an yang dipaksakan negara dan modernisasi/industrialisasi tetapi membutuhkan identitas baru. Geopolitik budaya umat Islam Indonesia sekarang berada di tengah persaingan tiga “supra negara” yaitu, (nilai) Demokrasi Barat, supra-negara berupa “*global political Islam*”, serta Supra-Negara Kebudayaan Konfusianisme (Jacques, 2010: 20-25). Umat Islam Indonesia menjadi “bahan rebutan” aliran Fundamentalisme Islam (al diwakili Jamaah Islamiyah dan ISIS yang beraliran Salafi), demokrasi Liberal

(Indonesia dianggap AS sebagai mitra strategis menghadapi China) dan Konfusianisme China. Sejauh ini globalisasi nampak telah membuahkan polarisasi umat Islam: di satu pihak oleh tarikan globalisme Islam (aliran Salafi) dan di lain pihak oleh tarikan demokrasi (Barat). Pilihan demokratisasi politik yang dipilih di Era Reformasi sementara ini dianggap mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan ruang politik, baik tuntutan politik identitas “asli” lokal, gerakan salafi, liberalis, maupun Konfusianisme.

Di samping itu, globalisasi aliran Neo-liberal yang telah masuk ke Indonesia menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih dalam melalui desentralisasi, termasuk pada sekolah/madrasah.

“Differences of wealth and social class, a further factor that has long fractured Indonesian integration, have deepened in recent years, partly under the influence of external agencies, such as the World Bank and Asian Development Bank, which have each pressed for more structural adjustment measures. Under this new regime of structural adjustment, or economic globalisation (Welch and Mok: 2003), wealthier and more powerful communities with greater cultural and financial resources have extended their advantage. Decentralisation has further licensed this cleavage” (Amirrachman, 2009:147)

Masalahnya adalah pada tataran konsepsional penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional, termasuk pada madrasah, format mana yang akan dibentuk umumnya masih dijawab dengan gamang: yaitu antara bergerak mempertahankan tradisi lama, dan atau selektif, serta eklektif terhadap hal baru yang hadir bersama demokratisasi dan globalisasi itu. Sebagai contoh, dari segi kurikulum bahasa nampak bahasa Inggris (di semua sekolah) dan bahasa Arab (di madrasah) telah banyak diberikan. Tantangan atau peluang yang diberikan oleh Konfusianisme, masih belum masuk dalam orientasi hampir semua sekolah/madrasah di Indonesia. Di pihak lain, respon terhadap globalisasi yang nyata diambil oleh berbagai sekolah/madrasah di tanah air adalah-bukan kerjasama, melainkan kompetisi, antara lain dengan menggaet pihak luar (*sister school* di luar negeri) atau bahkan sekolah/madrasah, pada umumnya sekolah swasta, dibentuk sebagai *franchise* sekolah asing, guna menghadapi sekolah /madrasah lokal. Kompetisi nampaknya lebih merebak dan komersialisasi nampaknya menjadi salah satu caranya. Dalam hal ini, madrasah yang umumnya berbasis sosial ekonomi

masyarakat menengah-bawah nampak mendapat tantangan serius.

Oleh karena itu menemukan orientasi yang tepat bagi sistem pendidikan madrasah ke depan, dengan kata lain politik pendidikan nasional, politik madrasah dan MAN-IC khususnya, untuk merespon secara konsepsional geopolitik budaya globalisasi tersebut, merupakan kebutuhan strategis yang dapat disumbangkan untuk membangun bentuk yang kokoh pendidikan yang berkarakter keIslaman-keIndonesiaan sekaligus.

Di samping tantangan geo-politik budaya global yang masuk ke Indonesia seperti di atas, pilihan politik dalam berbangsa dan bernegara, yaitu demokratisasi, juga menjadi tantangan, baik berupa tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan (yaitu agar pada keduanya lebih demokratis). Sosialisasi demokrasi *melalui* praktek pendidikan (pembelajaran terhadap mitra didik) merupakan hal yang nampak baru bagi sekolah/madrasah, antara lain oleh karena munculnya isu hak-hak azasi anak (Zamroni, 2001). Sosialisasi demokrasi melalui pelaksanaan pembelajaran *dapat* terjadi atau potensial oleh karena pendidikan berdampak pada tiga hal: pertama, meningkatkan mobilitas kultural (siswa menjadi kritis, *civilized*, otonom, solider, multikultural dan toleran) (Gouldner, 1979:50). Kedua, pendidikan meningkatkan mobilitas horisontal selepas sekolah (kelompok terdidik cenderung berurbanisasi yang menimbulkan '*interest based society*' yang bertolak dari pluralitas etnik, sosial dan budaya pada suatu wilayah perkotaan, bukan '*identity-based society*' seperti yang terjadi pada komunitas pertanian. *Interest based society* ini menuntut nilai dan tatanan sosial yang demokratis (Ma'ruf, 2003:30) Ketiga, pendidikan meningkatkan mobilitas vertikal (pembentukan kelas menengah yang berakar sosial plural dan berperan penting dalam mengontrol negara) (Sujatmiko, 2003:40-47, Gouldner, 1979:50). Peran pendidikan yang demikian dapat dianggap merupakan prasyarat utama bagi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai *civil society* atau masyarakat madani⁵, yaitu masyarakat yang menurut Arif Budiman (dikutip oleh Tilaar, 2003: 49) mempunyai ciri-ciri demokrasi, inklusivisme, egalitarianisme, dan toleransi.

Namun demikian, potensi sosialisasi demokrasi kepada peserta didik melalui pendidikan, khususnya melalui proses pembelajaran, dapat mubazir bahkan sebaliknya dapat melahirkan nilai dan prilaku sosial anti demokrasi manakala antara lain rekrutmen siswa, kurikulum dan cara pembelajarannya tidak dirancang untuk itu (Suparno, 2000:60). Terdapat gejala yang memprihatinkan di sekolah dan madrasah sekarang, yaitu kecenderungan untuk menemukan identitas eksklusif yang nampak pada rekrutmen siswa secara eksklusif (kelompok mampu atau kelompok agama tertentu saja) dan pembelajaran pada ideologi keagamaan dengan cara yang kurang kritis (*religious mindedness*) sehingga kurang toleran. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali apakah rekrutmen siswa, kurikulum dan cara pembelajaran yang telah dilakukan di madrasah, dan juga di kebanyakan sekolah, itu telah sejalan dengan semangat demokratisasi.

Tantangan yang kedua dalam sosialisasi demokrasi adalah *pada* penyelenggaraan (*governance*) pendidikan. Demokratisasi pada penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu mengubah tata hubungan antara pemerintah, sekolah dan masyarakat serta siswa, sehingga lebih memungkinkan lembaga pendidikan sebagai arena publik (Habermas, 1991) yang '*dialogis dan partisipatif*'. Sosialisasi demokrasi pada penyelenggaraan pendidikan mengkondisikan dan memberikan "relasi kuasa" bagi masyarakat untuk terlibat dalam *governance* dan manajemen untuk terselenggarakannya pendidikan yang demokratis. Demokratisasi pada penyelenggaraan pendidikan melalui partisipasi komunitas dan desa sangat penting untuk keberhasilan pendidikan. Secara empirik, dari 520 sekolah yang diteliti di Jawa Tengah, Pradhan dkk, menemukan bahwa demokratisasi melalui partisipasi komunitas dan desa terbukti signifikan meningkatkan hasil pembelajaran (sementara suntikan dana dan SDM, seperti yang ditekankan pemerintah, kurang signifikan)

"We find that institutional reforms of school committees that enhance its social capital in the community show positive effects on learning but interventions that enhance financial and human capital are less cost effective..... Our results also speak to well-known, cross-country evidence showing that changes in educational spending show weak

⁵ Dari bermacam-macam pengertian atau bahkan definisi-definisi *civil society* atau 'masyarakat madani', Iwan Gardono Sujatmiko (Sujatmiko, 2003:40-47) yang bertolak dari pendapat Foley dan Edwards menyimpulkan bahwa terdapat 3 tipe *civil society*, yaitu tipe horisontal, tipe vertikal dan tipe gabungan keduanya. Tipe horisontal menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang mengikat

kebersamaan masyarakat yang plural, tipe vertikal menunjukkan adanya asosiasi dan ruang public yang dimunculkan oleh tipe pertama di luar atau menghadapi Negara.

correlations with changes in learning outcomes (World Bank, 2003). Like Duflo, Dupas and Kremer (2009), we find that providing resources alone is not cost effective. However, substantial gains are obtained when grants are combined with relatively cheap institutional reforms” (Pradhan dkk, 2013:6-8).

Di samping itu, lembaga pendidikan sebagai investasi sosial, budaya dan ekonomi akan menjadi kuat, lestari dan relevan dalam melakukan transformasi masyarakat dan dapat memetik nilai baliknya (*returns on investment*) yang maksimal jika berada pada “ruang persinggungan yang dinamis” antara komunitas, negara dan pasar. Artinya, lembaga pendidikan akan berperan maksimal manakala mampu melayani “titik-temu” kebutuhan antara masyarakat, negara dan pasar. Dalam jangka panjang, layanan yang tepat seperti itu akan menempatkan pendidikan sebagai agen yang mampu mentransformasikan hubungan antara ketiganya agar lebih meningkat sinergitasnya. Namun demikian, kebanyakan madrasah dan juga sekolah, kurang mengambil posisi yang tepat sesuai dengan perubahan hubungan tiga pilar tersebut. Sebagian besar sekolah sangat lekat dengan negara, sebagian besar madrasah lekat dengan masyarakat (Amirrachman dkk, 2009: 149) dan sebagian yang lain (sangat kecil, yaitu sekolah kejuruan) diharapkan lekat dan bergantung pada pasar. Dampak dari bias-bias tersebut menempatkan pendidikan seakan-akan bukan arena publik, masing-masing tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan *check and balances* dalam governance dan manajemennya, di samping hasilnya, yaitu kuantitas-kualitas lulusan, kurang mendukung “titik-temu” kebutuhan sebagai sinergitas tiga pilar tersebut. Spesialisasi sangat dibutuhkan, namun jika kelahirannya mengabaikan partisipasi pilar lainnya, seperti terjadi pada politik pengajaran jaman kolonial yang mengabaikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pendidikan sebagai strategi kebudayaan ini akan cenderung menempatkan pilar lainnya sebagai objek eksploitasi. Pemulihannya dari kondisi seperti itu mensyaratkan adanya pengembangan peran yang relatif seimbang antara tiga pilar tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesungguhnya peluang ke arah itu terbuka luas dengan lahirnya kebijakan Otonomi Madrasah sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Melalui pembentukan Majelis Madrasah, maka komunitas dan dunia usaha –di samping negara- mendapat peluang partisipasi politik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari berbagai tantangan di atas, nampaklah bahwa salah satu isu yang sangat strategis untuk menghadapi atau

memecahkan tantangan-tantangan di atas adalah isu demokratisasi: dalam *governance* pendidikan, dalam manajemen (pemberian bantuan kepada kelompok miskin), dalam mengembangkan Ke-Islaman dan Ke-Indonesia-an, dalam desentralisasi (untuk menghubungkan madrasah dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal, dan dalam proses pembelajaran). Tanpa memperhatikan tantangan strategis di atas, maka madrasah ke depan akan menjadi kekuatan yang isolasionis atau *dis-engagement* dan kurang efektif seperti pada masa-masa sebelumnya, karena madrasah tak akan mampu berperan “*to connect, compete and collaborate*” (hasil Konferensi Pendidikan Islam se-Dunia di Azerbaijan), baik bagi individu maupun kelembagaan.

Oleh karena itu, MAN-IC memerlukan penyegaran dan reorientasi guna mendapatkan sistem penyelenggaraan, manajemen, tenaga pendidik, kurikulum serta cara pembelajaran yang relevan dengan tantangan perubahan yang terbaru, khususnya demokratisasi, termasuk otonomi daerah, dan globalisasi. Ujudnya, antara lain, tuntutan bahwa madrasah hendaknya menerapkan sistem *governance* dan manajemen publik dan meningkatkan relevansinya dengan upaya penguatan iptek, demokratisasi dan otonomi daerah. Dengan kata lain, MAN-IC memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang mendukung bagi tercapainya nilai-balik budaya, sosial dan ekonomi yang maju/maksimal ke depan, serta bersifat emansipatif-demokratis sehingga terjadi keterbukaan, partisipasi, serta keberpihakan kepada yang tertinggal. Corak pembelajaran misalnya, harus menyesuaikan lebih lanjut dengan prinsip-prinsip “sharing” dalam demokrasi, dimana guru dan kurikulum bukan lagi seperti sekarang, yaitu masih dianggap sumber kebenaran tunggal, kurang menghargai hak azasi siswa, kurang dialog, dan siswa beridentitas lain (baca: agama lain) belum dijadikan mitra setara, kurang empati serta kurang menempatkan pihak selain guru sebagai sumber pengetahuan dan penilaian.

PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENUJU MODEL MAN-IC “BARU”

Gambaran untuk mendapatkan model MAN-IC yang diidealkan, paling tidak terdapat sejumlah prinsip bagi visi-misi “MAN-IC Baru” sebagai berikut; Pertama, di masa depan MAN-IC harus menjadi model yang mampu mengkolaborasikan tiga pilar: Negara, masyarakat dan dunia usaha. Ketergantungan MAN-IC yang kuat pada Negara yang terjadi sekarang harus dimaknai sebagai masa transisi. Kolaborasi itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sehingga madrasah akan lebih relevan

secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Sedangkan dalam manajemen, di samping mengedepankan prinsip efektif dan efisien, juga perlu lebih akuntabel dan transparan. Prinsip seperti ini sejak dini harus dikondisikan, agar madrasah negeri akhirnya benar-benar menjadi milik dan tanggung-jawab publik, bukan seperti sekarang yang lebih nampak terkesan sebagai milik dan tanggungjawab pemerintah atau sebaliknya milik keluarga. Kesan ini muncul karena pertanggung-jawaban lebih pada pertanggungjawaban administrasi anggaran DIPA ke Pemerintah, atau sebaliknya Yayasan, terutama sarana-prasarana dan nilai capaian Ujian Nasional, sedangkan isu manajemen yang lain (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) yang menyangkut komponen pendidikan yang lain (kurikulum, siswa, tenaga pendidikan/kependidikan, praktek pembelajaran) nampak diterima *taken for granted* oleh sekolah dan tidak terbuka ruang untuk partisipasi dari pihak di luar pemerintah. Misalnya rekrutmen siswa (seperti kelompok sosial-ekonomi mana yang lebih diuntungkan) serta apakah madrasah, terutama madrasah negeri tersebut sebagai jangkar Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an telah mencerminkan ke-bhinnekaan pemahaman ke-Islaman dan keberagaman etnis Nusantara, tampak kurang transparansinya, sehingga publik belum dapat melihat akuntabilitasnya. Melalui pengembangan keterlibatan/partisipasi peran non-negara dan pengembangan manajemen yang transparan, maka pemerintah melalui dinas, guru & civitas madrasah, dan orangtua murid serta masyarakat, termasuk dunia usaha, pada gilirannya dapat menjadi *stakeholders* yang saling berbagi visi, masalah, dan sumberdaya dan solusi untuk memajukan madrasah.

Kedua, perbaiki model MAN-IC sebagai madrasah percontohan hendaknya diarahkan untuk mempersiapkan sejak dini generasi baru yang kelak dapat menjawab modernisasi, tantangan global pendidikan Islam (*to connect, to compete and to collaborate*⁶) dan demokratisasi dengan berkarakter Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, Standar Pendidikan Nasional (SPN) sebagai pijakan awal dan hasil positif dari evaluasi internal yang telah dilakukan tetapi belum memasukkan globalisasi dan demokratisasi sebagai tantangan, belumlah cukup sehingga diperlukan formulasi karakter yang khas MAN-IC dengan visi-misinya yang baru guna menjawab tantangan di atas.

Ketiga, Takwa, cerdas, terampil sebagai tujuan akhir dari proses belajar nampak masih belum disasar secara seimbang oleh karena adanya penekanan pada pengembangan kognisi, sementara pengembangan

afeksi (kendati melalui agama khususnya kecerdasan spiritual relatif kuat dibanding pada sekolah umumnya) dan pengembangan psikomotorik/ ketrampilan, tampak masih kurang. Penekanan pada kognisi, seperti optimalisasi nilai UN (Ujian Nasional) dan penghafalan al-Qur'an sebagai "simbol" penanda MAN-IC selama ini perlu diimbangi dengan pengembangan afeksi dan psikomotorik. Oleh karena itu MAN-IC dengan visi-misi yang baru nanti perlu menyegarkan kembali pendidikan yang seimbang-utuh tersebut sebagai prinsip guna menyongsong tuntutan modernisasi, globalisasi dan demokratisasi.

Keempat, konsep sekolah berasrama (*boarding school*) sebagai alat untuk mempertemukan dan memelihara keanekaragaman sosial-budaya peserta didik, bukan untuk mengisolasi dan menyeragamkannya seperti yang umumnya terjadi. Sistem asrama yang memiliki sejumlah kelebihan untuk pendampingan proses belajar dan evaluasi terhadap perilaku (budi pekerti siswa), hendaknya tidak menjebak siswa sehingga hanya memahami "*school culture*"nya sendiri, tetapi relatif "buta" terhadap "*social and cultural environment*" sekitarnya seperti yang terjadi sekarang ini. Terlebih lagi MAN-IC yang mengadopsi model pondok pesantren sebagai lembaga reproduksi budaya toleran dan inklusif di Indonesia--, maka perlu menjadi kehidupan asrama sebagai sarana untuk mencapai keunggulan ketrampilan sosial yang santun dengan semangat "*to live together*", termasuk dengan umat beragama lain.

Kelima, cara belajar-mengajar didasarkan pada keseimbangan antara deduksi, induksi dan dialogis, agar siswa terlatih untuk berpikir dinamik yang melibatkan tiga hal sekaligus: prinsip umum, detail empirik dan cara pandang yang menyeimbangkan kepentingan pihak diri dan kepentingan orang lain. Sejauh ini pembelajaran umumnya menekankan cara "menabung" –materi berupa dalil, kaidah dan corak umum, sehingga bersifat deduktif, diikuti guru mengevaluasi serapan siswa sebagai "bank". Corak pembelajaran seperti ini kurang mengembangkan bahkan mematikan rasa keterlibatan terhadap empiri dan detail, serta mematikan sifat partisipatoris dan emansipatoris yang penting untuk membangun generasi yang mampu merumuskan masalah dan solusi sesama generasinya secara demokratis, sekaligus terlatih dengan cara dan langkah pemecahannya yang kontekstual-historis agar menjamin keadilan.

Keenam, menghindarkan terjadinya komersialisasi pendidikan, dengan mengedepankan porsi yang adil

⁶ Hasil Konferensi Pendidikan Islam se-Dunia di Azerbaijan, 2011.

antara mereka yang mampu menyumbang biaya pendidikan dengan mereka yang miskin tetapi cerdas dan memerlukan bantuan. Sistem subsidi dan subsidi silang perlu diadopsi dan harus didasarkan pada prinsip keadilan tersebut.

KELEMAHAN MAN-IC YANG MENDESAK UNTUK DITANGANI SAAT INI

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan MAN-IC yang baru tersebut di atas, maka terdapat kelemahan dan cara-cara mengatasinya. Kelemahan prinsipial yang mendesak untuk ditangani terdapat pada empat ke-tidak-seimbangan. Yaitu, kurang seimbangannya partisipasi antara pemerintah, orangtua/masyarakat dan dunia usaha; kurang seimbangannya penguatan antara afeksi, kognisi dan psikomotor atau *value, knowledge* dan *knowhow*; dan kurang seimbangannya penguatan antara kemampuan individual dan kemampuan kelompok serta kurang seimbangannya penguatan antara *academic/ school culture* dengan *socio-environmental culture*. Upaya penyeimbangan terhadap kondisi-kondisi timpang di atas sekaligus merupakan upaya di tingkat madrasah untuk menyiapkan generasi muda secara nyata untuk menyambut tantangan modernisasi, globalisasi dan demokratisasi seperti diuraikan di bawah ini.

Sistem pendidikan nasional yang kuat dan lestari tidak semata-mata bertumpu pada negara (etatisme), masyarakat (komunitarianisme) atau semata-mata bertumpu pada dunia usaha (kapitalisme), melainkan menjadi titik sinergi sekaligus membangun SDM yang relevan dengan menguatkan (partisipasi) ketiganya. Pihak MAN-IC sebagai lembaga dalam sejarah yang telah dijalaninya nampak menjadi “*battle-ground*” antara setidaknya-tidaknya dua aliran, yaitu yang menekankan peran (subsidi) negara (periode awal), dan peran partisipasi (finansial) masyarakat/orangtua siswa (akibat kurangnya dana anggaran pemerintah, periode krisis ekonomi tahun 1998). Pada periode terakhir, kembali menekankan peran (subsidi penuh) negara tetapi dengan catatan, bahwa MAN-IC dikhususkan untuk anak miskin. Peran dunia usaha/korporasi belum pernah nampak dalam *governance* dan manajemen MAN-IC. Sesungguhnya dengan Undang-undang Sisdiknas nomor 20 /2003 sistem pendidikan nasional telah mengarahkan pada keseimbangan partisipasi tiga pilar tersebut. Namun demikian, sekolah dan madrasah negeri pada umumnya masih sangat bergantung kepada negara. Dari prinsip ini juga terkandung makna bahwa

upaya pendidikan sebagai upaya pembudayaan adalah untuk menyiapkan SDM berkualitas dengan menginternalisasi dan mengembangkan *value, knowledge dan knowhow* dari tiga pilar yang saling mendukung dan *check and balances* itu. Sejarah MAN-IC sendiri menunjukkan bahwa periode ketika para walimurid diberi ruang partisipasi terbukti melahirkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Dilihat dari prinsip keseimbangan partisipasi tiga pilar tersebut, maka nampaklah beberapa kelemahan MAN-IC sekarang berikut berbagai akibatnya.

Kelemahan pertama adalah ketergantungan dana yang sangat besar kepada negara (subsidi siswa mendekati 100 persen,-- perkapita subsidi diperkirakan lebih dari Rp 3.5 juta per bulan) yang dialami MAN-IC sekarang adalah belum ideal dan kurang serasi dengan UU Sisdiknas yang berlaku (UU Sisdiknas tahun 2003 Pasal 46 (1)⁷ yang menekankan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan. Manajemen DIPA yang kurang fleksibel, di samping kurang memberi ruang bagi Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah, juga menyebabkan MAN-IC saat ini mengalami kelambanan respon terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan dan pengembangan yang cepat dan prima, salah satunya adalah dalam pengadaan guru (sebagian telah mendekati usia pensiun, sementara yang muda sebagian masih berstatus honorer).

Kelemahan kedua, di luar isu gaji yang lebih kecil dibandingkan masa sebelumnya (pada Fase Pertama dulu gaji guru empat kali guru PNS), manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik (di tangan Kemenag) cenderung mendorong pertanggungjawaban guru lebih berorientasi formal-administratif “ke atas” dan kurang berorientasi pada peningkatan kinerja siswa dan pertanggungjawaban kolegal sebagai korps MAN IC sebagai korps madrasah model. Akibatnya, al. modal kreatifitas manajemen dan model pembelajaran yang selama ini telah diakumulasi MAN IC selama masa otonomi (periode kedua), cenderung kurang berkembang sekarang.

Kelemahan ketiga, sebagaimana umumnya “fenomena siswa bebas-bea”, kepedulian orangtua /wali terhadap pembelajaran anak dan sekolahnya itu lemah dan kurang kritis (Jowett dan Baginsky, 1988: 36–44), sehingga Majelis Madrasah (yang berfungsi memberi ruang partisipasi bagi masyarakat dan juga dunia usaha), kurang terpacu untuk bersinergi dengan Madrasah untuk memecahkan masalah-masalah kongkrit, baik yang bersifat kelembagaan, ketenagaan

⁷ UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 4 (1) Pendanaan pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

maupun kinerja siswa, secara lebih fokus dan terencana.

Di samping itu, Kelemahan selanjutnya adalah ketergantungan yang besar kepada subsidi pemerintah pada MAN-IC ini menjadi kurang sesuai dengan peran idealnya sebagai madrasah percontohan, karena kebanyakan madrasah adalah swasta yang justru banyak bertumpu pada (sumberdaya) partisipasi masyarakat. Lemahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha pada penyelenggaraan MAN-IC sebagiannya merupakan akibat dari dicabutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 2001 yang lebih demokratis dengan diterbitkannya Kepmen Nomor 409 Oktober 2003 yang lebih birokratis dan kurang demokratis (Amirrachman dkk, 2009:153). Kemen 101/2001 pada dasarnya merupakan upaya reformasi internal organisasi madrasah dan eksternal yaitu hubungan antara staf madrasah dengan kantor Kanwil, melalui tujuh kewenangan yang diberikan kepada Majelis Madrasah sebagai representasi masyarakat. Tujuh kewenangan Majelis Madrasah itu adalah kewenangan memilih kepala sekolah, anggaran, kurikulum muatan lokal, rencana pembelajaran, rekrutmen guru, pengawasan dan evaluasi pembelajaran (Amirrachman, 2009:151).

Menurut Amirrachman (2009: 152) " the lesson of Decree 101 is that policy-makers in MORA (Kementerian Agama, penulis) failed to make principals and teachers aware of the potential benefits of increased involvement of parents, teachers, and community members. The lack of resources and political will on the part of MORA is behind its failure to market parental and community participation ".

Dengan "kegagalan" itu maka ditetapkan Kepmen 409/2003 yang justru kembali memperkuat posisi Kanwil dan kepala sekolah, yang berdampak pada hilangnya ruang demokrasi dan transparansi publik. Dalam hal ini, civitas MAN-IC menganggap bahwa pencabutan Kepmen 101/2001 itu juga merugikan, karena sistem *governance* yang diderivasi dari Kepmen 101 ini dianggap telah terbukti mendorong tanggungjawab semua stakeholders dan telah berhasil mendorong manajemen sehingga dapat memberikan layanan yang cepat dan prima sehingga hasil pembelajaran lebih optimal. Partisipasi masyarakat/orangtua pada penyelenggaraan pendidikan berdampak positif pada hasil pembelajaran banyak berkesejajaran dengan berbagai hasil penelitian (Jowett

and Baginsky, 1988). Sebaliknya Kepmen yang baru (Kepmen 409/2003) dianggap telah mengurangi partisipasi masyarakat, mengurangi ruang gerak madrasah, menjebakannya pada manajemen yang formalistik dan berorientasi ke prosedur yang ditentukan dari atas, bukan berorientasi pada pengembangan madrasah yang tanggap dan inovatif untuk perbaikan hasil pembelajaran. Kepmen yang baru itu juga melemahkan rasa memiliki di kalangan pegawai akibat sistem rekrutmen kepegawaian dan manajemen keuangan di MAN IC yang kurang otonom akibat sentralisasi.

MAN-IC tahap sekarang yang sepenuhnya disubsidi dan seharusnya ditujukan hanya untuk siswa miskin, pada kenyataannya sebagian besar siswa justru berasal dari kelompok sosial menengah⁸, sehingga subsidi nampak sebagian besar tidak tepat sasaran, padahal kelas menengah secara etis mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi secara finansial (dan politik) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kelemahan kelima, Siswa yang berhasil direkrut dari kelompok miskin, apalagi yang mengambil jurusan IPS, setelah lulus, terutama dari MAN-IC Jambi, cenderung melanjutkan ke jurusan atau domain pendidikan non-teknologi, sehingga terlalu mahal dilihat dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan negara, di samping kurang efektif-produktif dilihat dari tujuan awal pendirian MAN-IC yang mengedepankan penguasaan iptek untuk mengatasi ketertinggalan umat.

Kelemahan keenam, di tengah subsidi siswa yang sangat besar, sistem *rekrutmen* siswa, di samping kurang tepat sasaran (seharusnya afirmatif terhadap kelompok miskin), juga tidak terproyeksikan secara tuntas dari hulu ke hilir (seharusnya dari hulu yaitu penelusuran minat dan bakat di tingkat SD/MI, ke seleksi penerimaan di MAN IC dan ke hilir, yaitu kontinuitas dengan pengarahannya ke jenjang Perguruan Tinggi yang menguntungkan. Di samping itu juga kurang efektif untuk mencapai misi, karena rekrutmen bersubsidi tinggi tersebut tidak disertai perencanaan *deployment*, yaitu *penempatan* oleh Pusat setelah mereka lulus Perguruan Tinggi. Akibatnya, melihat kenyataan kecenderungan bahwa alumni MAN-IC lulusan Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri sebagian bekerja di perusahaan asing, maka tanpa adanya "ikatan dinas" tersebut, manfaat langsung yang diperoleh negara akan kurang sesuai dengan subsidi besar yang telah dikururkan. Hal-hal di atas dapat diatasi manakala Majelis Madrasah diperkuat untuk

9 Dari kehadiran orangtua atau wali murid yang menimbulkan penumpukan kendaraan roda empat (lebih dari seratus) menjelang puasa lalu di MAN IC Serpong, begitu pula di Jambi kendati lebih

moderat, sulit untuk membenarkan bahwa semua siswa MAN IC patut untuk disubsidi seratus persen.

ikut merencanakannya, bukan diperlemah seperti sekarang.

Masalah ketujuh lainnya adalah dunia usaha sebagai salah satu *stakeholder* dan pengguna akhir hasil pendidikan, nampak belum dilibatkan dalam pengembangan MAN-IC, baik untuk aspek pengembangan, misalnya pendanaan melalui CSR, penyediaan sarana pembelajaran (misalnya untuk widya-wisata industri), maupun pendidikan kewirausahaan. Padahal, di pihak lain, dunia usaha di negara lain tempat sebagian lulusan MAN-IC melanjutkan, cenderung terlibat dengan penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan lulusan MAN-IC.

Di samping kelemahan pada *sistem governance* di atas, pada MAN-IC juga terdapat kelemahan lain yang mendesak untuk diperbaiki, yaitu berupa ketidakseimbangan substansi pendidikan. Pendidikan yang ideal menempatkan upaya pengembangan afeksi, kognisi dan psikomotor atau *value*, *knowledge* dan *knowhow* secara seimbang untuk menciptakan manusia yang utuh. Akibat pengaruh politik pendidikan pemerintah yang menempatkan pendidikan non-kejuruan lebih menekankan intelektual, maka secara umum sekolah non-kejuruan kurang memperhatikan pengembangan afeksi dan psikomotor atau *value* dan *knowhow*. Secara khusus penekanan sisi intelektualitas tersebut nampak pada penempatan hasil Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sekolah. Kendati pada bulan Januari tahun 2015 Pemerintah telah menetapkan bahwa hasil Ujian Nasional tidak lagi menentukan kelulusan, namun demikian dalam pembelajarannya masih menekankan pada pengembangan kognitif, sehingga ketidakseimbangan pengembangan substansi masih tinggi. Pengaruh politik seperti itu nampak direspon secara lebih arif oleh MAN-IC dengan penekanan pada target kelulusan Ujian Nasional yang tinggi, tetapi dengan disertai penguatan afeksi atau pengembangan *value*, terutama nilai-nilai keagamaan. Kendati demikian, di samping secara umum lemah pada pengembangan afeksi dan psikomotorik untuk mencapai keseimbangan tersebut, MAN-IC sekarang masih menghadapi kelemahan-kelemahan substansi itu, al.

Pada ranah nilai, pembelajaran nilai-nilai Ke-Islaman masih lebih menekankan nilai-nilai ritual dan kesalihan individual, kurang dan perlu ditekankan kesalihan sosial yang inklusif yang duduk pada (konteks) Ke-Indonesiaan, mengingat para siswa diharapkan menjadi model percontohan dari umat Islam mayoritas yang diharapkan menjadi jangkar (*anchor*) bangsa yang berazas Bhinneka-Tunggal-Ika.

Hal di atas nampaknya berhubungan pula dengan kelemahan pada ranah pengetahuan (mata pelajaran) Agama, Sejarah dan Kebudayaan. Pelajaran Agama Islam yang diberikan masih bertumpu pada salah satu aliran Teologi (Asy'ariyah-Maturidiyah) dan satu aliran Hukum Islam (Mazhab Syafii) sehingga siswa kurang terlatih sejak dini untuk berbeda pendapat dan toleran terhadap aliran (agama) lain: sikap yang penting untuk pengembangan demokratisasi. Pelajaran Sejarah Islam lebih banyak ditandai dengan perang dan kebudayaan Timur Tengah daripada narasi perbedaan pendapat dan upaya menggalang perdamaian dan kebudayaan Nusantara dan Asia umumnya. Akibatnya, nampak pelajaran sejarah kurang muatan pembelajaran nilai kepemimpinan, kecerdikan, keteladanan, kesantunan, diplomasi, dan toleransi dari para pelaku sejarah Islam di Indonesia sebagai "*peace maker*" untuk mengembangkan nilai dan perilaku Ke-Islaman yang sesuai dengan konteks Ke-Indonesiaan di atas. Aspek ini penting untuk mengembangkan jiwa kewarganegaraan dan kepemimpinan yang Islami yang cocok dalam kondisi multikulturalisme dan globalisme, sekaligus cocok untuk mengantisipasi ancaman persaingan antar bangsa yang sekarang lebih banyak bersifat "*intellectual warfare*" yang bertujuan hegemoni, bukan perang fisik untuk dominasi dan kolonisasi.

Kelemahan pengembangan afeksi dan psikomotorik yang dialami kebanyakan sekolah non-kejuruan juga menimpa MAN-IC, namun model asrama yang dimilikinya lebih membantu mengkondisikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik ini. Hambatan utamanya, seperti umumnya dikeluhkan oleh sekolah-sekolah, adalah waktu yang telah terlampaui padat oleh banyaknya mata pelajaran yang harus dicerna secara kognitif. Curahan waktu yang besar untuk pengembangan kognitif terutama melalui pelajaran matematika dan sains ini merupakan respon negara atas tuntutan lama yaitu modernisasi/industrialisasi yang memang banyak memerlukan penguasaan matematika dan sains, tetapi dengan penekanan seperti itu, belum memberikan porsi yang cukup untuk menjawab tantangan demokratisasi dan globalisasi. Kendati demikian, perubahan kebijakan nasional sejak awal tahun 2015 yang tidak lagi menempatkan hasil Ujian Nasional -- yang banyak menekankan kognisi -- sebagai penentu kelulusan dan kebijakan untuk kembali ke Kurikulum 2006 yang lebih sederhana, nampaknya dua kebijakan ini lebih memberikan peluang bagi madrasah untuk mengembangkan afeksi dan psikomotorik tersebut. Untuk itu, upaya untuk menemukan kristal substansi yang esensial untuk mengurangi tumpang tindih dan pengulangan materi pembelajaran, terutama

yang bersifat kognitif, mendesak dilakukan, agar pada gilirannya terbuka lebih luas peluang madrasah untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik, terutama yang relevan untuk internalisasi nilai demokratisasi dan globalisasi. Upaya, antara lain *integrasi* 17 nilai ke dalam berbagai mata pelajaran dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya, memang perlu untuk membangun karakter siswa, namun belum cukup.

Hal lain yang mendesak untuk diperbaiki adalah menyangkut pengembangan kemampuan individual dan pengembangan kelompok secara seimbang. Seperti pada pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia umumnya, pembelajaran di MAN-IC masih lebih menekankan pengembangan kemampuan peserta didik sebagai individu-individu yang mampu berkompetisi secara individual, sedangkan pengembangan kemampuan untuk bekerjasama dalam kelompok nampak –kendati telah dilakukan— masih jauh dari cukup. Kurangnya pengembangan kemampuan kerjasama dan berkelompok ini kurang kondusif, bukan hanya untuk memanasifasikan konsep ke-umat-an, melainkan juga untuk mempersiapkan lulusan agar kelak mampu berdemokrasi dan mengembangkan *corporate*: dua hal yang penting untuk memasuki era demokratisasi dan untuk secara bersama-sama (dalam satu *corporate* sebagai bangsa, *Indonesia incorporated*, bukan dicerai-beraikan) dalam menghadapi globalisasi.

Seperti pada umumnya sekolah-sekolah Indonesia, ujian mata pelajaran di MAN-IC lebih banyak didesain untuk mengetahui kemampuan individu, kurang diseimbangkan dengan upaya untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan berkelompok. Padahal, ujian kelompok penting, bukan hanya untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa, melainkan juga sekaligus mendorong siswa secara berkelompok memperdalam penguasaan materi secara partisipatif dan emansipatorik (hal-hal yang penting untuk menetralisasi dampak dari orientasi Ujian Nasional yang cenderung mekanistik). Di samping itu, bekerja dalam kelompok juga penting untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, mentransfer informasi secara horisontal dan setara: suatu prasyarat yang penting untuk pengembangan kepemimpinan, komunitas, demokrasi dan korporasi.

Selain itu, pembelajaran dan evaluasi penguasaan materi, sikap dan prilaku siswa lebih dipercayakan kepada guru dan kurang mengikutsertakan pembelajaran dan penilaian dari siswa sejawat. Evaluasi yang *top-down* ini, terutama bila menyangkut sikap dan prilaku siswa, bukan hanya kurang lengkap atau akurat, mengingat guru kurang mengetahui prilaku siswa sehari-hari dibanding teman sejawat, melainkan juga

cenderung menimbulkan orientasi masing-masing siswa lebih “ke atas”, sehingga kurang berorientasi “ke samping” dan komunal: orientasi yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial sebagai prasyarat pengembangan empati dan solidaritas, demokrasi serta kepemimpinan.

Evaluasi terhadap “kinerja (antar) kelompok” kurang ditekankan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Padahal, evaluasi terhadap kinerja antar kelompok siswa yang dilakukan oleh guru dan siswa kelompok lain dapat mendorong sikap akuntabel dan prilaku berkompetisi antar kelompok secara *fair*: suatu prasyarat penting untuk pengembangan sikap dan prilaku “siap dan *legowo* jika kalah” yang diperlukan dalam berdemokrasi. Dengan menerapkan model-model pembelajaran dan evaluasi seperti di atas, maka diharapkan pengembangan ranah afeksi dan psikomotor dapat dilakukan sekaligus dalam pengembangan ranah kognisinya.

Hal lain yang mendesak untuk diperbaiki adalah antara *academic school-culture* yang kuat tanpa diimbangi oleh penguatan *socio-environmental culture*. Penguatan *academic /school culture* pada dasarnya memberikan jembatan kepada para siswa yang berlatar belakang plural heterogen untuk bertemu dan terstandarisasi untuk distratifikasikan menurut tingkatan kemampuan akademiknya. Oleh karena itu, penguatan *academic /school culture* cenderung melunturkan latar belakang budayanya yang plural, sehingga *academic /school culture* yang meritokratik, yang memang penting untuk membentuk struktur sosial suatu bangsa, membentuk ke-Ika-an, di sisi lain juga mengakibatkan kondisi alienasi atau kehilangan identitas asli yaitu *socio-environmental culture* yang tumbuh berakar dari budayanya yang primer yang membangun ke-bhinnekaan. Untuk menjawab tantangan itu, kondisi di MAN-IC dan madrasah negeri pada umumnya, agaknya dipengaruhi oleh sejarah politik kebudayaannya. Pendidikan nasional sejak jaman Orde Baru, --berbeda dengan di masa Orde Lama,-- cenderung lebih menekankan *academic/school culture*, yang lebih menekankan pengajaran (*knowledge*) daripada pendidikan dalam artinya yang sempit (yaitu *panggulowentah*: bahasa Jawa) yang berupa sosialisasi nilai-nilai budaya yang terhubung dengan *socio-environmental culture*. MAN-IC memang telah mencoba menyeimbangkan *academic/school culture* dengan *Islamic social-culture* melalui kegiatan di asrama, yang mencoba menghidupkan kembali semacam tradisi pondok pesantren untuk membangun karakter sosial budaya siswa yang Islami. Kendati demikian, belum jelas betul sosok *socio-environmental archetype* -nya. Jika di dalam Perguruan Taman Siswa

guru dengan aliran pemikirannya ditempatkan sebagai sentral dan mempunyai kedudukan tertinggi, di MAN-IC memang secara fisik masjid dijadikan sentral, namun secara sosial-budaya belum jelas betul bagaimana sosok sosial-budaya (Modernis-Islam?) yang dijadikan rujukannya. *Kedua*, akibat semangat Kebangkitan Islam yang memuat pesan tentang adanya “satu umat” (*globalized*) yang sedang bangkit dan mengajak anggotanya yang bermacam-macam untuk bergerak menyamakan sikap dan langkah, cenderung mengabaikan perbedaan, sehingga dapat berujung pada hilangnya kebhinekaan. Sementara itu kemana sosial-budaya “satu umat” itu akan dibawa, secara makro masih menjadi perdebatan antara aliran yang menganggap Islam *compatible* dengan demokrasi dan aliran yang menganggap Islam tidak *compatible* dengan demokrasi.

Dalam hal ini, Keputusan Menteri No E 101 Maret 2001 yang memberikan 7 kewenangan kepada Majelis Madrasah yang mewakili komunitas di masing-masing madrasah untuk menentukan muatan lokal, di samping perencanaan pembelajaran, pembiayaan, memilih kepala sekolah, merekrut guru, dan supervisi dan evaluasi pembelajaran, (Amirrachman, 2009:151) sesungguhnya mengarahkan madrasah berorientasi pada sosok sosial-budaya demokrasi yang bertolak dari akar rumput (*grass-root democracy*). Dengan itu model rekrutmen guru di samping perlu didasarkan pada keahlian, profesionalitas, juga perlu berdasarkan pada kompetensi social, antara lain pemahaman yang memadai tentang sosial budaya lokal. Tetapi dengan dicabutnya Kepmen tersebut dan digantikan dengan Kepmen 409/2003 yang kurang demokratis, maka peluang untuk itu menjadi sempit dan ketidak-seimbangan yang berupa penekanan pada *academic school culture* terus berlanjut.

Namun demikian, untuk berubah menuju keseimbangan itu ke depan MAN-IC nampaknya mendapatkan momentum. Yaitu, peluang untuk mendiversifikasi dirinya sekaligus menyatukan keanekaragaman *Islamic socio-environmental culture* di daerah-daerah melalui pembangunan MAN-IC yang ditawarkan kerjasamanya oleh beberapa Pemerintah Daerah. Momentum ini bukan hanya sebagai peluang untuk mengembangkan *Islamic socio-environmental culture* di daerah-daerah, melainkan juga, jika Majelis Madrasah kembali direhabilitasi sesuai Kepmen yang lama (tahun 2001), pengembangan hubungan dengan kelompok lokal yang kuat melalui rencana kegiatan bersama, seperti yang ditemukan Pradhan dkk (2013:6-8) akan meningkatkan hasil pembelajaran. Dengan tantangan itu, MAN-IC diharapkan dapat juga berperan dalam pembentukan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika,

melengkapi peran yang dimainkan STPDN di Jatinangor Bandung, yang nampak masih lebih menekankan keikaan (sebagai penyiapan sdm birokrasi).

PENGEMBANGAN MAN-IC DI DAERAH-DAERAH

Kemungkinan MAN-IC “baru” dijadikan sebagai “model pendidikan berkualitas” akan terus bergulir ke berbagai daerah. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi secara masif tetapi kurang terarah, maka, di samping MAN-IC induk (terutama di Jakarta) memperbaharui diri dengan perbaikan atas masalah-masalah mendesak untuk menjawab tantangan startegis berupa modernisasi, globalisasi dan demokrasi—seperti telah disebutkan di atas, juga diperlukan schema yang dapat menghubungkan antara Kemenag (Dirjen Madrasah) dengan Pemda dan di lain pihak antara MAN-IC induk dengan MAN-IC yang dibangun di daerah-daerah.

Pengembangan MAN-IC “baru” di daerah-daerah sebagai kebijakan Kemenag menjawab permintaan daerah merupakan peluang untuk menjawab tantangan strategis. Seperti diutarakan Ohmae (2002:30), mempertahankan negara bangsa dari rongrongan globalisasi antara lain adalah dengan otonomi daerah yang membangun struktur berlapis dengan domain kewenangan Pusat dan Daerah yang tidak seragam. Implementasi desentralisasi madrasah untuk mencapai standar mutu nasional melalui penguatan Majelis Madrasah. Struktur berlapis ini diharapkan di satu pihak menyatukan dan di lain pihak memberikan ruang bagi penguatan partisipasi demokratisasi dan pengembangan identitas daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan relevansi pendidikan untuk pengembangan sosial-ekonomi dan budaya yang bhinneka. Untuk itu agar pengembangan/pembangunan MAN-IC “baru” di berbagai daerah dapat berperan seperti tersebut di atas, maka terdapat langkah-langkah yang diperlukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, antara lain:

Asal-usul kelahiran MAN-IC adalah untuk mencetak para siswa yang unggul dalam bidang sains dan tehnologi, maka perlu ditegaskan kembali visi-misi tersebut kepada Daerah; dalam bentuknya yang riil jurusan IPS ditiadakan dan kelak para alumninya diarahkan untuk meneruskan ke jurusan tersebut di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan negara atas SDM lulusan sainstek untuk modernisasi industri. Agaknya untuk itu diperlukan organ khusus di tingkat pusat (Kemenag, misalnya sub-direktoral Pendidikan Madrasah Unggul (dalam sains) yang tugas utamanya melakukan perencanaan, pengawasan, evaluasi seluruh

program yang berkaitan dengan MAN-IC seluruh Indonesia untuk membangun keikaan dengan standar karakter dan mutu keunggulannya. Sub-direktorat ini juga perlu memberikan definisi secara konkrit tentang kewenangan Kanwil dan Kandep terhadap (otonomi) MAN-IC sebagai madrasah unggulan. Ini diharapkan dapat mengurangi intervensi Kantor Wilayah Kemenag yang seringkali telah terlalu jauh yang dapat mengganggu projek percontohan otonomi MAN-IC yang segera didirikan di berbagai daerah tersebut.

Komitmen anggaran daerah terhadap madrasah MAN-IC yang akan didirikan, bukan sekedar lahan, perlu disetujui terlebih dulu. Kendati Surat Edaran no.903/2429/SJ Tahun 2005 dari Direktorat Badan Keuangan Daerah Depdagri, yang melarang alokasi anggaran Pemda untuk madrasah, telah dicabut dan diganti tahun berikutnya dengan Surat Edaran nomor 903/210/BKAD agar madrasah masuk dalam alokasi anggaran daerah, namun seperti disebutkan dalam laporan USAID dan DBE3 (2007:19) diskriminasi anggaran terhadap madrasah masih tetap berlangsung. Oleh karena itu persetujuan anggaran non-diskriminasi terhadap madrasah dari Pemerintah Daerah perlu terlebih dulu diperoleh Kemenag.

Untuk jangka pendek, hubungan antara Pemerintah Pusat (Kemenag) dan Pemerintah Daerah (Pemda), lebih diarahkan pada upaya keseimbangan peran, namun Pusat sebaiknya tetap memiliki hak istimewa untuk menentukan cetak biru dan jaminan Otonomi MAN-IC di daerah, sedangkan Daerah lebih berfungsi sebagai pendukung. Dalam bentuknya yang riil, Pemerintah Pusat (Kemenag) bertanggung-jawab mengawal model Model MAN-IC yang ideal, pengadaan infrastruktur (gedung), gaji guru dan beasiswa, sedangkan Pemda selain bertanggungjawab atas pengadaan tanah, pemeliharaan dan rehab ringan infrastruktur, serta sangat dimungkinkan al.melalui peran Dinas Sosial dan BAZIS Daerah, Pemda membantu bea-siswa anak miskin berpotensi yang ada di wilayahnya.

Kemampuan finansial dunia usaha dan kelas menengah, yang karena berbagai alasan nampak sekarang lebih berminat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah unggul, sangat potensial untuk dilibatkan secara internal dalam melaksanakan model MAN-IC “baru”. Oleh karena itu, maka relasinya dengan kelompok ini perlu dirumuskan kembali dalam sistem *governance* MAN-IC “baru” nanti. Caranya antara lain, seperti yang diharapkan seluruh stakeholders MAN-IC yang diteliti maupun temuan Amirrachman dkk (2009), MAN-IC di daerah perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya partisipasi finansial, bagi komunitas.

Terdapat tiga alasan untuk itu; pertama, di samping partisipasi komunitas terbukti meningkatkan hasil pembelajaran siswa, partisipasi komunitas juga meningkatkan pembelajaran demokrasi dalam penyelenggaraan (*governance* dan manajemen) pendidikan. Kedua, komunitas MAN-IC lebih siap untuk partisipasi (finansial dan politik) dibandingkan komunitas madrasah biasa. Komunitas walimurid MAN-IC umumnya berasal dari kelas menengah, lebih kuat modal sosial ekonomi dan politiknya untuk ketiga hal (finansial, hasil pembelajaran siswa dan sosialisasi demokrasi) tersebut, berbeda dengan MAN “biasa” yang pada umumnya berbasis sosial kelas bawah. Ketiga, guna mengurangi secara bertahap beban negara, perlu juga dipikirkan ulang tentang pembiayaan subsidi. Subsidi-silang sangat dimungkinkan, namun kriteria penerima bantuan perlu mempertimbangkan prinsip merit dan emansipasi kelompok sosial-ekonomi terencil/tertinggal. Kebijakan afirmatif ini dimaksudkan agar MAN-IC berperan ‘reproduksi kelas menengah’ secara elitis, melainkan menyiapkan munculnya kelas menengah berakar Bhinneka, karena juga memberi kesempatan mobilitas vertikal bagi mereka yang terbelakang, miskin tetapi berpotensi tinggi (UU Sisdiknas Bab IV Pasal 5, utamanya ayat (3) dan (12).

Agar MAN-IC terhindar dari eksklusifime, seperti hanya menerima pendaftar yang berlatar belakang pesantren seperti disuarakan akhir-akhir ini--maka prinsip *multi-entry*, yaitu tidak tertutup bagi lulusan SMP, SLB, perlu diterapkan. Namun agar lulusan MTS tidak tergusur dalam kompetisi masuk MAN-IC, maka dapat dilakukan kebijakan kuota yang proporsional (sebanding jumlah murid MTs terhadap SMP di daerah yang bersangkutan) tanpa mengorbankan standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin kualitas kuota tersebut, maka ketertinggalan kemampuan lulusan MTs dibanding lulusan SMP, terutama dalam pelajaran IPA dan Matematik, perlu diperkecil, antara lain melalui *capacity building* oleh Pusat agar MTs unggulan di masing-masing daerah menjadi *pilot project* pembinaan terhadap MTs yang lain.

Model rekrutment guru secara terbuka melalui media secara nasional, seperti ketika guru generasi pertama MAN IC Serpong direkrut, perlu dihidupkan kembali dan dijadikan acuan utama untuk menjauhi perekrutan berskala lokal yang telah terbukti kurang mampu menjaring guru yang berkualitas, termasuk kompetensinya secara sosial. Jika perlu, setiap guru yang belum diangkat diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk Pusat (Kemenag) dan melakukan magang yang evaluasinya menyertakan guru-guru senior MAN IC induk (di

Jakarta). Rekrutmen guru oleh daerah setempat dapat dilakukan, tetapi khusus untuk menjadi tenaga pengajar Kurikulum Lokal.

Guna memberikan otonomi kepada MAN-IC dalam menentukan kepala sekolahnya, pencalonan/pengusulannya diserahkan kepada guru-guru lokal yang diasumsikan lebih mengetahui kemampuannya, termasuk kemampuannya untuk membangun kolaborasi antara sekolah dengan komunitas. Kemampuan ini penting bagi kepala sekolah, karena dari temuan Amirrachman dkk (2009) terbukti dapat mengembangkan *governance* dan manajemen madrasah yang demokratis, transparan dan akuntabel secara lebih damai. Pengangkatan kepala madrasah—bukan berikut pemilihannya yang telah mengakibatkan matinya demokrasi madrasah, dapat terus dilakukan Kandep/ Kanwil. Pengembangan multikulturalisme di kalangan guru dan siswa sangat penting, maka penempatan guru dan siswa dengan sistem quota atau sirkuler ke MAN IC daerah lain perlu dipertimbangkan.

Pengembangan KTSP (kurikulum Terkait Satuan Pendidikan) Kurikulum Nasional maupun KTSP Kurikulum Lokal perlu melibatkan guru-guru pengampu bersama Universitas /daerah, agar KTSP tersebut terkait dengan orientasi pengembangan potensi daerah yang dipilih agar lebih relevan. Misalnya, di Riau potensi lokalnya adalah perkebunan dan perdagangan dengan (etnik China) Singapura, maka arah Mulok dapat berupa perkebunan dan Bahasa Mandarin untuk mengembangkan diri dalam menyambut globalisasi. Dalam tahun ini akan didirikan MAN-IC yang baru di tiga kabupaten, maka seluruh persiapan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas sebagai acuannya.

KESIMPULAN

Kehadiran MAN-IC yang lahir dari semangat untuk menjawab tantangan modernisasi merupakan kebijakan pengembangan kualitas SDM yang penting, karena penekanan dan keberhasilannya dalam pembelajaran sains menonjol di tengah pendidikan nasional yang umumnya tertinggal di bidang tersebut. Kendati demikian, sekarang MAN-IC sebagai suatu lembaga telah mengalami keusangan dan beresiko irrelevan jika tidak dibangun kembali sesuai tantangan-tantangan strategis baru yang muncul, yaitu terutama demokratisasi dan globalisasi. Secara garis besar, terdapat tiga masalah yang menimbulkan keusangan pada MAN-IC sehingga kurang relevan dengan tantangan tersebut, yaitu ketidakseimbangan pada *governance*, manajemen dan pada kurikulum/pembelajaran.

Peran pemerintah terlalu menonjol dalam *governance* dan manajemen MAN-IC, kurang memberikan ruang partisipasi kepada komunitas dan dunia usaha. Ini menimbulkan ketergantungan yang besar kepada Pemerintah. Manajemennya sangat sentralistik dan pertanggungjawabannya birokratis “ke atas dan kaku”, sehingga kurang fleksibilitas bagi pelaksana di madrasah untuk dapat merespon secara tepat dan cepat tantangan lokal yang khas dan mendesak. Di samping itu kurang transparan-akuntabel kepada stakeholders sehingga melemahkan kepedulian. Kondisi seperti ini kurang memanfaatkan partisipasi komunitas dan dunia usaha yang justru dapat berkontribusi pada sosialisasi demokrasi, peningkatan hasil dan relevansi pembelajaran.

Dalam hal kurikulum, terdapat kecenderungan MAN-IC mengembangkan jurusan IPS padahal prioritas pada pengembangan SDM berlatar belakang sains penting sebagai khittahnya untuk kelanjutan modernisasi. Di samping itu, kurikulum keagama-annya seharusnya, tetapi kurang-- memberikan ruang bagi pengembangan rasa (afeksi) dan kegiatan (psikomotorik) yang mendorong kemampuan bekerjasama, multikultural dan toleran. Cara pembelajaran dan penilaiannya juga bersifat *top-down* dan menekankan secara berlebihan kompetisi siswa, kurang memberikan ruang dialogis, kerjasama dan kesetaraan (ke samping yaitu sesama individu / kelompok lain). Kondisi di atas, bukan hanya kurang relevan dengan tantangan demokratisasi, melainkan juga menimbulkan kerentanan pada siswa dari pengaruh paham global Islamis yang otokratik dan intoleran/radikal, di samping dapat menimbulkan semangat persaingan antar sesama secara berlebihan yang dapat membahayakan “semangat Indonesia-incorporated” sebagai bangsa dalam menghadapi globalisasi. Penyeimbangan yang dilakukan terhadap kondisi-kondisi di atas dapat berperan penting, apalagi jika model MAN-IC yang baru nanti dijalankan di seluruh madrasah di Indonesia, guna menyiapkan baik civitas madrasah maupun masyarakat pendukungnya dalam menghadapi tantangan modernisasi, demokratisasi dan globalisasi.

Momentum untuk melakukan penyeimbangan terhadap *governance*, manajemen dan kurikulum/ pembelajaran di atas pun telah tiba. Antara lain, Undang-undang Sisdiknas memberikan hak partisipasi bagi masyarakat termasuk dunia usaha melalui Majelis Madrasah dan Manajemen Berbasis Madrasah. Undang-undang Guru juga mengamatkan perlunya kompetensi sosial (kepala sekolah/madrasah), dan cara pembelajaran yang demokratis yang menghargai hak-hak azasi siswa (termasuk hak-hak Ekosobnya). Di samping itu pendidikan karakter melalui intergrasi 17 nilai ke

dalam berbagai mata pelajaran seperti yang didorong pemerintahan sekarang, juga membuka ruang lebih luas untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik untuk menyiapkan generasi guna menghadapi modernisasi, demokratisasi dan globalisasi. Di samping itu, terdapat antusiasme para guru dan (calon) wali murid MAN-IC (umumnya dari kelas menengah) terhadap demokratisasi (Majelis Madrasah) serta aliran CSR dari dunia usaha ke madrasah, maupun adanya semangat MAN-IC dalam bekerjasama dengan *sister school*-nya di luar negeri (sekolah Katolik di Sydney). Kondisi di atas memberikan gambaran momentum bagi penyeimbangan yang diperlukan, agar MAN-IC lebih berperan dalam menyiapkan SDM yang lebih berkualitas sesuai dengan tantangan jaman. Hambatan untuk melangkah ke arah itu terletak terutama pada resistensi oknum birokrasi di Kanwil dan Kandep Kemenag, yang telah memperoleh keuntungan dari leverage politik dan ekonomi yang terbuka dari Kepmen 409/2003 yang mengurangi partisipasi dan *check & balances* dari pihak komunitas dan civitas kampus pada *governance* dan manajemen madrasah. Kepmen di atas dianggap oleh para birokrat Kemenag waktu itu cocok untuk madrasah yang umumnya memang miskin sumberdaya. Sebaliknya bagi civitas MAN-IC, Kepmen ini telah melemahkan kekuatan *governance* dan manajemen yang telah terakumulasi dari pengalamannya bermitra dengan komunitas pendukung madrasah, menjauhkan lembaga dari sumberdaya potensial di luar negara, serta tidak memberikan ruang untuk berinovasi guna meningkatkan hasil pembelajaran maupun untuk menanggapi tantangan jaman yang berkembang.

Sesungguhnya Kepmen yang bersifat re-sentralisasi ini merupakan “langkah mundur” dan menjauh dari *grass root democracy* dan melemahkan identitas lokal yang penting untuk mempertahankan negara bangsa dari efek negatif globalisasi. Di samping itu juga kurang kondusif untuk mengembangkan madrasah model yang mempunyai potensi sumberdaya (kelas menengah dan berpendidikan) yang besar seperti MAN-IC sekarang. Oleh karena itu, di tengah penerimaan yang luas dari pihak MAN-IC, perwakilan berbagai “madrasah maju” dari daerah serta pemikir di Direktorat Madrasah terhadap konsep model MAN-IC “baru” yang ditawarkan ini, maka yang diperlukan sekarang adalah *political will* dari birokrat Kemenag. Yaitu untuk antara lain menghidupkan kembali (semangat) Kepmen 101/2001 yang telah dicabut itu, melakukan kajian lebih mendalam menyangkut konsep model MAN-IC “baru” dan schema kerjasama antara Kemenag dan Daerah yang ditawarkan tersebut berikut tahapan replikasinya ke madrasah di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrachman, Alpha, Saefudin Syafi'i, dan Anthony Welch. 2009. Decentralising Indonesian Education: The Promise and the Price dalam J. Zajda and D.T. Gamage (eds.), “Decentralisation, School-Based Management, and Quality”, *Globalisation, Comparative Education and Policy Research* 8, hlm.141-157.
- Aronowitz, Stanley dan Henry A .Giroux. 1990. *Post-Modern Education: Politics, Culture dan Social Criticism*. Oxford: University of Minnessota Press.
- Becker, Harry S. 1975. *Investment in Human Capital: with special reference on education*. California: University of Berkeley.
- Bourdieu, Pierre. 1986. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. Richard Nice. London: Routledge and Kegan Paul.
- Bourdieu, Pierre dan Jean-Claude Passeron. 1977. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Los Angeles: Sage Publication.
- Brugmans, I.J. 1987. “Politik Pengajaran,” dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, H. Baudet dan I.J. Brugmans (eds.) Jakarta: Yayasan Obor.
- Bush, Robin. 2003. Akar Kultural “Civil society” NU, dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t. INCIS-CSSP-USAID, 2003:28-36.
- Fukuyama, Francis. 2007. Identity and Migration. *Prospect Magazine Issue 131, 25th February 2007*.
- Furnivall, J.S. 1943. *Educational Progress in South East Asia*, New York: Institute of Pacific Relations.
- Giroux, Henry A. 1981. *Ideology, Culture and the Process of Schooling*. Washington DC: Falmer Press.
- Gouldner, Alvin W. 1979. *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. London: The Macmillan Co.
- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: The MIT Press.
- Inkeles, A. and D.H. Smith. 1974. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jackson, Robert. 2011. Cameron, 'multiculturalism' and education about religions and beliefs <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru/>
- Jacques, Martin. 2010. *When China Rules the World*. New York: The New York Syndicates.
- Jowett S, Baginsky M. 1988. Parents and education: a survey of their involvement and a discussion of some issues. *Educ Res* 30(1):hlm. 36–44
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship*. New York: Oxford University Press.Inc.

- Martin, David. 1978. *A general Theory of Secularization*. Agincourt: The Book Society of Canada.
- Ma'ruf, Jamhari "Komunalisme atau "Civil Society"? dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t. INCIS-CSSP-USAID, 2003, hal.25-28.
- Noor, Farish A. Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen. 2007. Introduction: Behind the Walls: Re-Appraising the Role and Importance of Madrasahs in the World Today, dalam *The Madrasa in Asia*. Farish A. Noor, Yoginder Sikand dan Martin van Bruinessen (Eds). Amsterdam: Amsterdam University press, hlm. 9-30.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Memudarnya Negara-Bangsa*. Jakarta: Qalam
- Pradhan, Menno. Daniel Suryadarma, Amanda Beatty, Maisy Wong, Armida Alisjahbana, Arya Gaduh, Rima Prama Artha. 2013. Improving Educational Quality Through Enhancing Community Participation: results from a randomized field experiment in Indonesia, The World Bank.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 2003. Wacana *Civil society* di Indonesia, dalam Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil society di Indonesia*. T.t. INCIS-CSSP-USAID, hlm.40-56.
- Suparno, Paul. 2000. Kurikulum SMU yang Menunjang Pendidikan Demokrasi, dalam Sindhunata (ed.) *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius, hlm.50-67.
- Suyanto. 2013. Negara Adikuasa Pendidikan. *Kompas* Kamis, 10 Januari 2013, hlm. 7.
- Terry Mart. 2012. Menuju Pendangkalan Nalar. *Kompas*, Kamis 27 Desember 2012, hlm. 6.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesiatera.
- Tsuchiya, Kenji. 1987. *Democracy and leadership: The Rise of The Taman Siswa Movement in Indonesia*. Transl. Peter Hawkes. Honolulu: University of Hawaii Press.
- USAID & DBE3, 2007. Analysis of the Current Situation of Islamic Formal Junior Secondary Education in Indonesia. ddp-ext.worldbank.org/Edstats/IDNdprep07.pdf.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

LAMPIRAN.

Pola Pikir Mengembangkan Model Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia



